

EFEKTIVITAS PENGGUNAAN PENGELOLAAN ANGGARAN PEMBANGUNAN DI DESA TANJUNG DALAM KECAMATAN CURUP SELATAN KABUPATEN REJANG LEBONG

Bambang Irawan¹, Lizvan M Sitorus², Sucipto Febrianto³, Dwi Sinta⁴

¹Mahasiswa Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Pat Petulai, Bengkulu, Indonesia Jl. Basuki Rahmat Nomor. 10 Dwi Tumggal, Curup, Bengkulu, Indonesia.

^{2,3,4}Dosen Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Pat Petulai, Rejang Lebong, Bengkulu, Indonesia.

Email: bambangtanjungdalam@gmail.com

ABSTRAK

This thesis discusses the effectiveness of the use of development budget management in Tanjong Village in Curup Selatan District, Rejang Lebong Regency. This type of research uses a qualitative method (qualitative descriptive), namely This study explains the phenomena and facts that occur in the field, which produce descriptive data both related to behavior, perception, motivation, researcher actions observed in the form of written words or writing. While for data collection techniques that are more relevant to the needs of this Thesis or Final Project research, the researcher uses the following data collection techniques: observation, interviews, documentation.

The results of this study indicate that, 1) The strategy that will be carried out by the Village Head, especially in the field of development such as in the field of agriculture with the construction of farm roads and pumping, in the field of facilities and infrastructure such as the construction of sports fields, health such as the construction of integrated health posts, and infrastructure such as the construction of embankments. 2) The form or realization carried out by the Village Head is the construction of around four farm roads, pumping to channel water to the rice fields, construction of embankments around the riverbanks. Before carrying out the development, first invite community leaders to attend a meeting so that the development to be carried out can run smoothly. 3) The obstacles faced by the Village Head during the development are the limited space for utilizing human resources who are experts in their fields so that the development is not in accordance with expectations such as the construction of embankments that are easy to collapse. The implications of this study are 1) The strategy carried out by the Village Head is not comprehensive, the development carried out is only in certain areas so that it causes problems in the community. Therefore, the work program to be carried out should not only cover certain work programs, but cover all the needs for the welfare of the village community. 2) The realization of the development carried out by the Village Head is still minimal, there is a need for improvement in the fields of development, economy, and health. The need for the development of integrated health posts which is still very minimal, reactivating BUMDes to help the village economy and increase community empowerment. 3) The importance of development for the progress of a village requires the Village Head to carry out development by employing according to expertise and according to the appropriate funds.

In addition, in carrying out development, it must be in accordance with the SOP (Standard Operating Procedure) so that the development carried out is in accordance with what is expected.

Kata Kunci: Efektivitas, Pengelolaan Anggaran, Pembangunan Desa, Dana Desa, APBDesa.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar konstitusi bangsa Indonesia mengatur tentang Pemerintah Daerah, yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi menjadi provinsi dan masing-masing provinsi dibagi lagi menjadi kabupaten serta kota. Dalam pelaksanaan pemerintahan, baik provinsi maupun kabupaten dan kota, diatur oleh peraturan perundang-undangan. Desa adalah sebuah area yang mempunyai sistem pemerintahan yang memainkan banyak peran penting dalam mendukung daerah, baik dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam proses pembangunan. Desa memiliki satu kesatuan dari komunitas hukum yang memiliki batasan wilayah serta kekuasaan untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya demi kepentingan warga berdasarkan ide masyarakat, asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) berperan penting dalam keberhasilan pembangunan daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dapat mencerminkan kinerja dan kapasitas pemerintah desa dalam mendanai dan mengelola penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan di desa, Ahyaruddin, M dan Ramadanis, (2019).

Penerapan otonomi wilayah yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah memberikan peluang untuk meningkatkan beragam program pembangunan di seluruh nusantara, dengan penekanan khusus pada daerah pedesaan. Hal ini menjadi penting karena desa masih dianggap sebagai harapan dan fondasi dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Dalam konteks keberadaan BPD sebagai lembaga legislatif di tingkat desa, otonomi desa memberikan kesempatan bagi BPD untuk bertindak dalam memantau jalannya pembangunan di desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Desa memberikan solusi atas perdebatan mengenai eksistensi BPD dalam struktur pemerintahan desa. Posisi Badan Permusyawaratan Desa berada sejajar dengan Kepala Desa, sehingga setiap keputusan kebijakan membutuhkan persetujuan dari BPD. Pemisahan seperti ini bertujuan untuk menciptakan tata kelola desa yang lebih kontemporer, di mana secara politik terdapat perbedaan antara pembuat kebijakan (BPD) dan pelaksana kebijakan (Kepala Desa). BPD setidaknya mewakili warga yang terpilih secara demokratis untuk membahas kebijakan sebelum pemerintah desa melaksanakannya. Desa Tanjung Dalam terletak di Kecamatan Curup Selatan, Kabupaten Rejang Lebong, yang memiliki latar belakang yang memperkuat peran krusial kepala desa dalam pengelolaan pembangunan. Sebagai pemimpin di level lokal, kepala desa diberikan wewenang dan kekuasaan melalui peraturan untuk mengelola serta mengatur semua aktivitas pembangunan di desa. Keterlibatan yang mendalam dengan anggota masyarakat lokal memungkinkan kepala desa untuk menangkap langsung keinginan dan kebutuhan warga, sehingga keputusan yang diambil akan lebih sesuai dan responsif terhadap realitas masyarakat. Di samping itu, kemampuan kepala desa untuk membangun kerjasama dan berkoordinasi dengan pihak luar seperti pemerintah daerah dan lembaga swadaya masyarakat memiliki peranan krusial dalam memastikan kelancaran serta efektivitas pelaksanaan proyek pembangunan. Sebagai pemimpin di level lokal, kepala desa diberikan wewenang dan kekuasaan melalui peraturan untuk mengelola serta mengatur semua aktivitas pembangunan di desa. Keterlibatan yang mendalam dengan anggota masyarakat lokal memungkinkan kepala desa untuk menangkap langsung keinginan dan kebutuhan warga, sehingga keputusan yang diambil akan lebih sesuai dan responsif terhadap realitas masyarakat. Di samping itu, kemampuan kepala desa untuk membangun kerjasama dan berkoordinasi dengan pihak luar seperti pemerintah daerah dan lembaga swadaya masyarakat memiliki peranan krusial dalam memastikan kelancaran serta efektivitas pelaksanaan proyek pembangunan.

Dengan pemahaman yang luas mengenai aspek sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan di desa mereka, kepala desa dapat mengenali peluang dan hambatan yang ada serta merumuskan pendekatan yang sesuai untuk mengatasi masalah pembangunan. Keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada akuntabilitas dan transparansi dalam melaksanakan tanggung jawab, yang melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan

memberikan informasi yang jelas mengenai pengalokasian anggaran serta kemajuan pembangunan. Oleh karena itu, peran kepala desa dalam pengelolaan pembangunan di Desa Tanjung Dalam bukan hanya menjadi aspek strategis, tetapi juga berpengaruh besar dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan pembangunan keseluruhan.

Aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan pembangunan di Desa Tanjung Dalam adalah:

1. Otoritas dan Kewenangan

Pemimpin desa memperoleh kekuasaan dan tanggung jawab yang ditetapkan oleh hukum untuk mengatur pengembangan di level desa. Sebagai wakil pemerintah di tingkat lokal, pemimpin desa memiliki hak untuk menetapkan kebijakan, menentukan penganggaran, serta mengelola dan memantau implementasi proyek pembangunan.

2. Keterlibatan Masyarakat Sebagai sosok kunci dalam komunitas, pemimpin desa memiliki interaksi yang mendalam dengan penduduk setempat. Ini memungkinkan pemimpin desa untuk lebih mengenali kebutuhan dan harapan masyarakat dalam proses pembangunan desa. Dengan cara ini, pemimpin desa mampu membuat pilihan yang lebih akurat dan responsif terhadap kebutuhan yang sebenarnya dari masyarakat.

3. Koordinasi dengan Pihak Eksternal

Kepala desa juga berperan sebagai jembatan antara pemerintah lokal, organisasi masyarakat sipil, serta berbagai pihak lain yang terlibat dalam proses pembangunan desa. Kemampuan kepala desa untuk membangun kolaborasi dan mengatur hubungan dengan berbagai pihak luar sangat krusial untuk menjamin keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan proyek pembangunan.

4. Pengetahuan Lokal

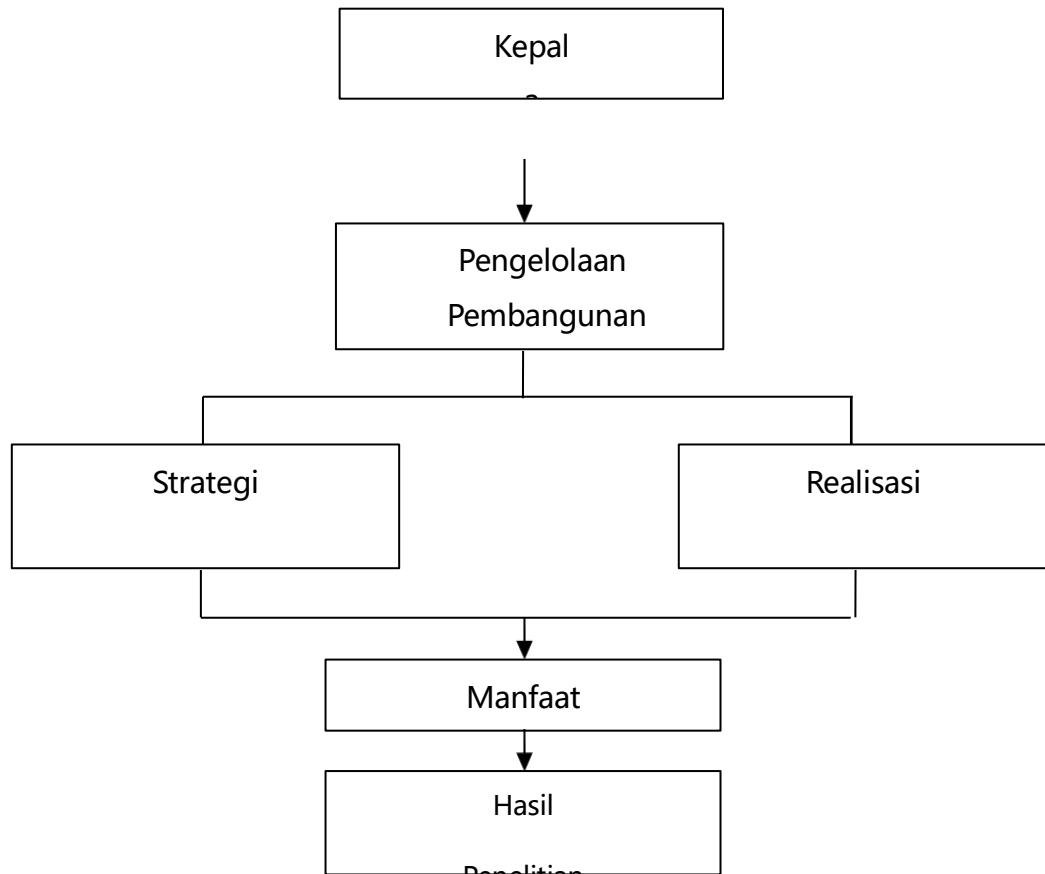
Kepala desa biasanya memiliki wawasan yang luas mengenai keadaan sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan di daerah mereka. Wawasan ini sangat penting dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan, sebab membantu kepala desa untuk mengenali kemungkinan serta kendala yang terdapat di desa mereka dan merancang strategi yang tepat untuk menangani permasalahan tersebut.

5. Akuntabilitas dan Transparansi Kepala desa memiliki tanggung jawab langsung kepada warga desa terkait pengelolaan pembangunan. Karena itu, mereka perlu bersikap terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan, dengan melibatkan warga dalam proses pengambilan keputusan, menyediakan informasi yang jelas mengenai pembagian anggaran dan kemajuan pembangunan, serta menerima kritik dan saran dari masyarakat.

Agar Desa Tanjung Dalam mengalami kemajuan dalam pengelolaan pembangunan, dibutuhkan kebijakan yang dapat mempermudah kepala desa dan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan mengenai pembagian anggaran dan kemajuan pembangunan, serta menerima masukan dan saran dari masyarakat.

Kerangka Konseptual

Gambar 1.1
Kerangka Konseptual



METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif (deskriptif kualitatif), di mana penelitian ini menggambarkan fenomena dan kenyataan yang terjadi di lapangan, yang menghasilkan data deskriptif yang berkaitan dengan perilaku, persepsi, motivasi, serta tindakan peneliti yang diamati dalam bentuk kata-kata tertulis atau tulisan.

1. Jenis Data

Jenis data yang diterapkan dalam studi ini mencakup hal-hal berikut: Data kualitatif yang merupakan informasi yang dikumpulkan atau diperoleh dalam bentuk narasi, misalnya sejarah Desa Tanjung Dalam, susunan organisasi di Desa Tanjung Dalam, dan penjelasan lain yang relevan.

2. Sumber Data

Data primer adalah informasi yang didapatkan secara langsung dari Desa Tanjung Dalam tanpa melalui pihak ketiga, seperti hasil observasi dan wawancara. Data sekunder adalah informasi yang dikumpulkan dari dokumen atau arsip Desa Tanjung Dalam serta sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan topik yang sedang diteliti.

Berikut adalah instrumen penelitian yang digunakan dalam studi ini:

- a) Peneliti itu sendiri berfungsi sebagai instrumen utama.
- b) Pedoman Wawancara/Daftar Pertanyaan

- c) Pedoman wawancara merupakan alat yang digunakan dalam proses wawancara sebagai acuan untuk mendapatkan informasi, yang berbentuk daftar pertanyaan.
- d) Buku catatan dan pulpen adalah perangkat yang digunakan untuk mencatat dan merekam seluruh percakapan dengan sumber data.
- e) Alat perekam
- f) Kamera.
- g) Tape recorder.

HASIL PENELITIAN

Strategi Kepala Desa dalam Anggaran Pengelolaan Pembangunan

Strategi yang diterapkan oleh pemerintah desa dalam konteks ini berfungsi sebagai penggerak, di mana pihak desa harus mampu memberikan arahan, edukasi, dan mendorong masyarakat untuk terlibat aktif dalam segala aspek pembangunan yang dilaksanakan. Dengan strategi tersebut, diharapkan keikutsertaan masyarakat dalam menerapkan kebijakan pembangunan desa bisa terlihat jelas, yaitu adanya peningkatan partisipasi di berbagai bidang, termasuk sumber daya, administrasi dan koordinasi, serta keterlibatan dalam program-program pembangunan.

Dalam pelaksanaan program pembangunan, diharapkan masyarakat bersedia untuk turut serta dengan memberikan tenaga, uang, barang-barang material, serta informasi dan berkontribusi dalam pelaksanaan keputusan yang telah dibuat bersama. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Tanjung Dalam, Bambang Irawan menyatakan bahwa:]

“Ada beberapa strategi dalam anggaran Pengelolaan Pembangunan yang akan saya lakukan agar program kerja dapat berjalan dengan lancar khususnya dalam bidang pembangunan mengutamakan kepentingan Bersama dan mengutamakan yang sangat penting dan wajib dibangun yang sangat dibutuhkan oleh Masyarakat seperti membangun infrastruktur jalan penghubung atau akses Masyarakat dalam membawa hasil tani yang belum tersentuh bangunan. Dalam artian bahwa masyarakat dapat di ajak untuk bekerja sama dalam melaksanakan setiap program kerja. Selain itu, menyaring hal apa saja yang dibutuhkan masyarakat serta bermanfaat dalam masyarakat maupun desa itu sendiri.”

Berdasarkan pernyataan yang diungkapkan dari hasil wawancara di atas, maka hasil analisis bahwa sebelum melaksanakan program kerjanya, Kepala Desa memikirkan mengenai cara yang dapat dilakukan agar program kerja yang dilaksanakan sesuai dengan kepentingan masyarakat dan kemajuan desa. Hal tersebut mendapat dukungan

ri Sekretaris Desa, Beni yang mengatakan bahwa:

“Langkah-langkah Strategi yang kami ambil dalam melakukan pembangunan adalah dengan melakukan survei ke lapangan dengan tujuan untuk melihat hal apa yang harus diperbaiki serta di tambah sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat seperti pembangunan jalan tani dimana di desa ini dominan dengan mata pencaharian sebagai petani.”

Realisasi Kepala Desa dalam Melakukan Anggaran Pengelolaan Pembangunan

Menurut Michael Zwell, terdapat 3 tonggak penting yang menjadi dasar kesuksesan kinerja Kepala Desa yaitu Kompetensi Kepemimpinan, Kompetensi dari karyawannya, dan budaya kerja yang dapat memaksimalkan kompetensi- kompetensi tersebut. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kemampuan menjadi hal yang dapat mendorong dan mendasari keberhasilan kepala desa dalam menjalankan perannya di masyarakat. Oleh karena itu, desa perlu terus berupaya untuk menciptakan kondisi yang kondusif serta memfasilitasi perkembangan dan kemampuan Kepala Desa. Adapun hasil wawancara dengan Kepala Desa terkait realisasi pembangunan desa yang mengatakan bahwa:

”wujud dari pembangunan yang saya lakukan sudah terlihat jelas seperti pembangunan infrastruktur jalan penghubung atau akses Masyarakat dalam membawa hasil tani yang belum tersentuh bangunan. Sebelum saya melaksanakan pembangunan, terlebih dahulu saya mengundang tokoh-tokoh masyarakat untuk menghadiri rapat agar pembangunan yang akan dilakukan dapat berjalan dengan lancar sehingga dalam anggaran pengelolaan pembangunan setiap anggaran pembangunan secara merata dan tepat sasaran.” Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa bernama Beni yang mengungkapkan: “wujud pembangunan yang telah dilakukan sudah terlihat jelas seperti sekarang pembangunan jalan tani untuk membantu para petani. Setiap anggaran pengelolaan pembangunan di desa harus secara merata sesuai dengan Keputusan Bersama Kepala Desa, BPD, Perangkat Desa dan Masyarakat.”

Berdasarkan hasil analisis di atas bahwa sebelum melaksanakan program kerjanya, Kepala Desa mengundang para tokoh masyarakat untuk menghadiri rapat dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau dengan kata lain sebagai salah satu sumber kegiatan ekonomi desa. Seperti yang dikatakan salah seorang warga yang bernama Sainir dan Reki bahwa:

“BUMDes di kampung kita seperti sekarang ini berupaya untuk menghidupkannya. Padahal jika dilihat disini banyak ibu-ibu yang menganggur. Hal ini tentu dapat dimanfaatkan untuk menggali keterampilan ibu-ibu entah itu dengan membuat kerajinan lalu dipasarkan serta membuat Inovasi baru sesuai dengan kebutuhan Masyarakat.”

Manfaat Anggaran Pengelolaan Pembangunan yang Dilakukan oleh Kepala Desa Tanjung Dalam

Tujuan perencanaan anggaran pembangunan daerah adalah untuk menyusun suatu rencana pembangunan yang merupakan pegangan atau acuan. Pemerintah daerah melaksanakan pembangunan yang didasarkan pada kemampuan dan potensi sumber daya (alam dan manusia) serta peluang-peluang ekonomi yang ada, sehingga memungkinkan dapat ditangkap secara cepat.

Sasaran program anggaran pembangunan pedesaan adalah untuk meningkatkan kehidupan sosial ekonomi keluarga petani sehingga mereka mendapat kesejahteraan yang berarti terpenuhinya kebutuhan material (makanan, minuman, pakaian, dan alat-alat rumah tangga) dan spiritual (pendidikan, agama, keamanan, kepercayaan terhadap diri sendiri) dengan layak. Untuk mencapai hal itu, sebagian keluarga petani memerlukan bantuan untuk meningkatkan kemampuannya sebagai petani dan sebagian lagi memerlukan mata pecaharian di luar sektor pertanian.

Dalam pembangunan desa, menurut Mosher yang menjadi tujuan utama adalah bukanlah pertumbuhan pertanian saja, tetapi peningkatan kualitas hidup para petani yang sebagian bergantung kepada pendapatan keluarga dan sebagian lagi bergantung pada hal-hal lain. Namun, pertumbuhan pertanian perlu ditingkatkan karena sebagian besar dari pendapatan bergantung pada hasil pertanian.

Adapun yang menjadi tujuan pembangunan seperti yang diungkapkan Kepala Desa Bambang Irawan yang mengatakan bahwa :

“ Manfaat dan Tujuan dalam anggaran pengelola pembangunan adalah untuk memenuhi target yang ingin dicapai, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, serta meningkatkan sumber daya manusia contohnya dalam bidang perekonomian serta menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.” wawancara dengan Beni selaku Sekretaris Desa bahwa:

“Manfaat dan Tujuan dilakukannya pembangunan untuk memajukan desa menjadikan desa menjadi lebih baik dari sebelumnya, memanfaatkan pemberdayaan masyarakat sehingga perekonomian dapat lebih maju.”

Berdasarkan hasil analisis di atas bahwa tujuan dari anggaran pengelolaan pembangunan desa adalah untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta menjadikan desa lebih maju dari sebelumnya. Selain untuk mensejahterahkan masyarakat, Kepala Desa harus memperhatikan potensi yang tepat sebelum melakukan pembangunan seperti hasil wawancara dengan Herli yang mengatakan:

”Manfaat dan Tujuan anggaran pengelolaan pembangunan yang dilakukan memang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, sebelum itu harus membagi tujuan dari pembangunan jangka panjang, menengah dan jangka pendek. Setelah itu, barulah dapat menyusun dan memposisikan anggaran pengelolaan pembangunan apa yang relevan sehingga tujuan dari pembangunan itu sendiri dapat tercapai.”

KESIMPULAN DAN SARAN

Bertolak dari rumusan masalah dari uraian hasil penelitian serta analisa yang di kemukakan, maka dalam skripsi ini dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut:

1. Strategi yang akan dilakukan Kepala Desa adalah pembangunan di segala bidang. Seperti dalam bidang pertanian dengan pembangunan jalan tani dan pompanisasi, dalam bidang sarana dan prasarana seperti pembangunan lapangan olahraga, bidang kesehatan seperti pembangunan posyandu, serta infrastruktur seperti pembuatan tanggul.
2. Adapun wujud atau realisasi yang dilakukan oleh Kepala Desa adalah mengadakan rapat desa dengan tokoh masyarakat. Pembangunan yang terwujud sekitar empat jalan tani, pompanisasi untuk mengalirkan air ke sawah-sawah, pembangunan tanggul di sekitar pinggir Sungai.
3. Manfaat pembangunan yang dilakukan oleh Kepala Desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan sumber daya manusia khususnya dalam bidang perekonomian.

Bertolak dari temuan penelitian tentang Peran Kepala Desa Dalam Anggaran Pengelolaan Pembangunan Di DESA TANJUNG DALAM KECAMATAN CURUP SELATAN KABUPATEN REJANG LEBONG, maka perlu disempurnakan dan dilakukan tentang hal-hal sebagai berikut :

1. Strategi yang dilakukan Kepala Desa sudah menyeluruh, pembangunan yang dilakukan di utamakan pada wilayah tertentu sehingga mempermudah akses meningkatkan perekonomian dalam masyarakat. Maka dari itu, program kerja yang akan dilakukan seharusnya mencakup beberapa program kerja tertentu, namun mencakup keseluruhan kebutuhan bagi kesejahteraan masyarakat desa.
2. Realisasi pembangunan yang dilakukan Kepala Desa sudah maksimal, perlunya peningkatan dalam bidang pembangunan, bidang perekonomian, bidang kesehatan. Perlunya pembangunan posyandu yang masih perlu ditingkatkan, mengaktifkan kembali BUMDes guna membantu perekonomian desa dan meningkatkan pemberdayaan Masyarakat.
3. Manfaat pembangunan bagi kemajuan suatu desa mengharuskan Kepala Desa untuk melakukan sosialisasi dan kerjasama dengan masyarakat dan aspirasi masyarakat juga dapat di saring dan dipertimbangkan agar pembangunan yang dilakukan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- .Journal ilmu pemerintahan 1, no.2 (2013).
Alauddin University Press, 2014).
- Arenawatu. Administrasi Pemerintahan Daerah (Yogyakarta: Graha Ilmu,2014). Handayani, Risman. Pembangunan Masyarakat Pedesaan (Cet.I; Makassar :
- Fikri, Hamdani Khairul. Kepemimpinan Islam Berwawasan Duniawi dan Ukhrawi, Tasamuh 13, No. 1 (Desember 2015)
- Fitria, Tira Nur. Kontribusi Ekonomi Islam dalam Pembangunan Ekonomi Nasional, Vol. 02 No.03 (November 2016)
- Indrayani, Damsar. Pengantar Sosiologi (Jakarta: Kencana, 2016).
- Karim, Syahrir. Politik Desentralisasi Membangun Demokrasi Lokal (Makassar:Alauddin University Pers 2012).
- Mahi, Ali Kabul, Sri Indra Trigunarso. Perencanaan Pembangunan Daerah (Depok: Kencana, 2017).
- Maimunah. Kepemimpinan dalam Perspektif Islam dan Dasar Konseptualnya, Vol. V No. 1 (April 2017)
- Pernama, Ryan. Peran Kepemimpinan Kepala Desa dalam Pembangunan di Desa Long Beliu Kecamatan Kelay Kabupaten Berau, Vol 4.
- Pernama, Ryan. Peran Kepemimpinan Kepala Desa dalam Pembangunan di Desa Long Beliu Kecamatan Kelay Kabupaten Berau, Vol 4
- Rusyan, H.A. Tabrani. Membangun Efektivitas Kinerja Kepala Desa (Jakarta: Bumi Aksara 2018)
- Safriani, Andi. Telaah Terhadap Asas Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, Jurisprudensi 4, No. 1 (Juni 2017)
- Safriani, Andi. Telaah Terhadap Asas Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, Jurisprudensi 4, No. 1 (Juni 2017)
- Tanjung Keranjang Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau”, e
- Widjaja, H.A.W. Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh Hendrik, Okta. “Peran Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pembangunan Desa